

KEDAMAIAN HAKIKI MELALUI PENGEMBANGAN AGROBISNIS SKALA KECIL KAUM PEREMPUAN : POTRET INDUSTRI ENBAL LEMPENG DAN KACANG BOTOL DI PULAU KEI KECIL

Ny. K. Esamar¹, Sr. Brigita, PBHK², dan C. Ufie³

¹ Jaringan Mitra Perempuan: Jurusan Pendidikan MIPA FKIP UNPATTI

² Gerakan Perempuan Peduli: Jaringan Pemerhati Anak: Yayasan Kasih Mandiri

³ Jurusan Budidaya Pertanian FAPERTA UNPATTI; INLULINS (Institut Kepulauan Kecil Dangkal Sahul)

ABSTRAK

Revitalisasi pertanian khususnya budidaya tanaman melalui peningkatan ketahanan pangan lokal, dan kesejahteraan rumah tangga petani, berwawasan agribisnis ke depan, dapat bercermine dari kegagalan program yang sama pada Orde Baru dengan ideologi revolusi hijau bermuatan patriarki, topangan inovasi teknologi yang lebih maskulin atau bias gender. Untuk situasi Maluku pasca-konflik, pengembangan agribisnis skala kecil kaum perempuan seperti Industri Enbal Lempeng dan Kacang Botol di Pulau Kei Kecil, adalah fundamental bagi kedamaian hakiki dan keamanan berkelanjutan. Karena tidak saja memenuhi tuntutan revitalisasi pertanian rakyat yang lestari, tetapi juga memecahkan akar-akar masalah konflik (kemiskinan, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya), sekaligus capaian Tujuan Pembangunan Abad Milenium (*peace through 'women agribusiness' development*). Penelitian partisipatif ini dilakukan dalam tiga tahap, pertama asesmen lapangan di Debut dan Ngilingof, kedua asesmen lapangan pada instansi terkait di Tual dan konfirmasi validatif di Debut, ketiga lokakarya kesetaraan perempuan dan laki-laki (*gender equity*) di Ambon yang juga melibatkan ibu-ibu dari Kei Kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agribisnis kaum perempuan yang cenderung berjalan sendiri apa adanya ini, terhalang oleh berbagai problem yang dapat dikategorikan sebagai problem teknis agribisnis, dan problem struktural. Karenanya koordinasi dan pendampingan partisipatif terintegrasi sangatlah perlu, termasuk dukungan inovasi teknologi pertanian padat karya yang ramah perempuan dan ramah lingkungan. Revitalisasi pertanian kepulauan Maluku ke depan, hendaknya menjadikan 'agribisnis skala kecil menengah dan agrowisata' yang sensitif gender sebagai basis pembangunan ekonomi rakyat lestari, dimana sektor-sektor ekonomi nonpertanian serta lainnya ikut diarahkan untuk mendukungnya secara terpadu dan terfungsionalisasi menurut aneka gugus pulau yang ada.

Kata Kunci: Pengembangan agribisnis, skala kecil, kaum perempuan, industri enbal lempeng, kacang botol, pulau Kei Kecil.

PENDAHULUAN

Untuk situasi Maluku pasca-konflik, Kievelitz et al. (2004 dalam Tim LDP, 2005) mengingatkan bahwa semua upaya pembangunan hendaknya mengkreasi kondisi-kondisi bagi *sustainable peaceful & post-conflict recovery*, yang diorientasikan pada empat tujuan utama, yakni (1) stabilitas politik (termasuk politik pembangunan pertanian & inovasi teknologi yang mempromosikan *democracy as a key conflict-poverty reducing tool*), (2) keamanan dan respek terhadap HAM (Hak Asasi Manusia mencakup *gender equity*, kebutuhan pangan sehat bergizi, stabilitas lingkungan dan air bersih), (3) reduksi eksklusi masyarakat dan penyembuhan sosial (*social healing*), (4) akses terhadap layanan publik (yang setara dan terdesentralisasi), (5) standar hidup/kesejahteraan yang layak. Tujuan-tujuan *recovery* dan rekonstruksi pasca-konflik berkelanjutan yang spesifik ini, patut diekspansi lebih lanjut di dalam implementasi program nasional revitalisasi pertanian, yang berbasis kandungan dan partisipasi masyarakat lokal serta kesetaraan gender.

Dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2005 – 2009 yang dikuatkan dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2005, ditargetkan sasaran akhir revitalisasi pertanian antara lain, pertumbuhan sektor pertanian rata-rata 3,52 persen per tahun selama periode 2004 – 2009, serta meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani (Ely, 2005); di pedesaan yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia. Begitu pula dengan rencana revitalisasi Jangka Panjang 2005 – 2025. Untuk mencapai pertumbuhan ini, pemerintah menetapkan lima program dimana tiga urutan teratas yang relevan adalah, (1) peningkatan ketahanan pangan (ditargetkan 90 – 95 persen kebutuhan pangan diperoleh dari produksi domestik/lokal), (2) pengembangan agribisnis, dan (3) peningkatan kesejahteraan petani. Semua ini harus dilakukan bersama masyarakat petani (*participatory approach*); yang didukung dengan penyuluhan dan penyuluhan partisipatif (Kolopaking dalam Kompas, 2005); yang sensitif gender.

Dapat dikatakan bahwa kemiskinan yang dominan pada pedesaan di Indonesia, berwajah perempuan (Pambudy, 2005); kemiskinan menjadi wajah perempuan pedesaan (Sagaia, 2005). Maknanya, tidak saja pembangunan pada era Orde Baru (Revolusi Hijau-RH), tetapi setelah era otonomi daerah pun mengabaikan perempuan di pedesaan (bias gender). Kendati peran dan jam kerja mereka sangat besar dan vital. Mulai dari melahirkan dan menyusui, sehingga perempuan diberi tugas (peran gender) mengurus bayi dan anak (Hardaputranta, 1997), yang dalam pepatah Kei Ulay Nen Mu Sus Lean

(maksudnya anak berharap perlindungan dan bantuan ibunya) (Renyaa, 1989), atau disertai tanggungjawab terbesar untuk mengelola urusan domestik (Indraswari, 2005).

Selain itu, perempuan juga berperan sebagai pintu ketahanan pangan-medicine dan penelusur plasma nutfah (Khudori, 2002), memainkan suatu peranan krusial dalam survival keluarga dan komunitas berbasis pertanian (Langil, 1999), banyak berperan dalam menjaga keseimbangan dengan alam sehingga kontinuitas produksi tetap terjaga secara lestari (Khudori, 2002), lebih menguasai pengetahuan/budaya lokal dan berandil dalam transmisi nilai-nilai ke generasi berikut (Emery, 2000), simpul utama yang mewarisi pengetahuan tentang jaringan hubungan kekerabatan dan kekeluargaannya yang sangat kompleks dan ekstensif (Ngamelubun, 2004), sumber perdamaian dan kehidupan pada saat konflik (Ruddick, 1985 dalam Hartaningsih, 2005) seperti halnya konflik Maluku (Luhukay, 2000), terutama di Kei Maluku Tenggara (Ngamelubun, 2004).

Namun perempuan pedesaan tidak memiliki akses dalam pengambilan keputusan (Sagala, 2005); terjadi ketidakadilan gender yang dapat dilihat sebagai marginalisasi perempuan mulai dari perencanaan pada sektor ekonomi dan sosial budaya (Zulham, 2002); termasuk urusan politik di masyarakat (Hardaputranta, 1997). Aktivitas perempuan dianggap pinggiran saja, seperti *hidden economy* (Emery, 2000). Menggelisahkan bahwa, semua peran yang dimainkan oleh kaum perempuan dalam proses rekonsiliasi di Kepulauan Kei pada tahun 1999 - 2000 masih merupakan "peran pinggiran", peran-peran "di belakang layar" yang dijalankan lebih atas dasar naluri alamiah perempuan yang cinta damai dan anti kekerasan; mereka nyaris tidak terlihat sama sekali di jalur utama (*mainstream*) proses-proses rekonsiliasi tersebut (Ngamelubun, 2004). Ketidaksetaraan gender sebagai konstruksi sosial budaya ini begitu memprihatinkan.

Padahal, sejak dua decade terakhir ini tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu negara/daerah tidak lagi sekedar fokus ekonomi, tetapi lebih menekankan IPM (Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index*) yang lebih menempatkan setiap individu manusia sebagai pusat intervensi dalam pembangunan bagi pemenuhan hak dasar utama (hak atas pangan sehat bergizi, pendidikan, keamanan, lingkungan misalnya) (Aristiarni, 2004). Meliputi indeks pembangunan gender atau *Gender-related Development Index* (GDI), dan indeks pemberdayaan gender atau *Gender Empowerment Measure* (GEM). Premis utama pembangunan manusia ini adalah *people-centered* (*people-driven*), termasuk dinamika perempuan adat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga mereka (Hartaningsih, 2004). Menurutny, Amartya Sen, salah seorang pemrakarsa pendekatan pembangunan manusia ini, memilih pendekatan kualitas dalam pembangunan manusia dengan mengaitkan kapabilitas, kemerdekaan dan HAM. Di dalam *Freedom as Development* (1999) Sen menyebutkan bahwa, kebebasan atau kemerdekaan adalah inti pembangunan, dan arena itu masyarakat harus dibebaskan dari sumber-sumber ketidakbebasan itu, seperti kemiskinan (yang menyebabkan orang tidak berpeluang memperoleh pangan bergizi, dan rendahnya akses ekonomi (mencakup usaha perempuan)).

Dalam hal ini, jika IPM mengukur rata-rata pencapaian pembangunan, maka GDI melihat rataan pencapaian tersebut berdasarkan jenis kelamin sosial untuk merefleksikan ketimpangan (ketidakadilan, ketidaksetaraan) yang terjadi antara lelaki dan perempuan. Sementara GEM lebih memfokuskan pada kesempatan yang diperoleh perempuan dalam suatu negara/daerah, mengukur ketimpangan gender dalam partisipasi politik dan ekonomi serta proses-proses pengambilan keputusan yang melibatkan perempuan (terutama pedesaan) dalam posisi setara. Hartaningsih (2004) mengatakan, sasaran pembangunan manusia ini sebenarnya berkaitan dengan MDGs (*Millenium Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Abad Milenium, yang mempunyai sasaran dan target waktu yang jelas untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (memerangi kelaparan dan kemiskinan), mengurangi ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender sampai lebih dari separuh pada 2015.

Dubes khusus PBB untuk MDGs di Asia Pasifik, Erna Witoelar (Kompas, 2005) mengatakan, konflik horizontal di suatu daerah menyulitkan pencapaian MDGs, dan sebaliknya MDGs yang tak tercapai memberi peluang terjadinya konflik. Pencapaian MDGs menurutnya, dapat merupakan instrument untuk mencegah timbulnya konflik dan kekerasan, karena bagaimana pun akar masalah konflik tetap saja terkait dengan masalah kemiskinan (kesejahteraan yang rendah), ekonomi, pendidikan, lingkungan dan sumber daya alam, dan sebagainya. Data Bank Dunia menunjukkan, pada tahun 2000 saja diperkirakan sekitar 7,4 persen penduduk Indonesia berpendapatan 1 dollar AS per hari, jika menggunakan garis kemiskinan 2 dollar AS per hari maka angka kemiskinan di Indonesia menjadi 53,4 persen (Alwi Shibab dalam Kompas, 2005). Sesuai platform MDGs, paling lambat tahun 2015 telah berkurang menjadi separuh proporsi orang miskin yang hidup dengan kurang dari 1 dollar AS sehari, baik laki-laki maupun perempuan.

Kondisi perempuan Indonesia kini, terutama terkait akses peningkatan kualitas hidup, masih memprihatinkan. Dengan peran dan jumlahnya yang besar, kaum perempuan ini sebetulnya merupakan tolok ukur penting dalam mendiskripsikan kondisi daerah/negara (Sadhana, 2005). IPM Indonesia tahun 2002 yang rendah yakni 0,69 (sama dengan kondisi Malaysia tahun 1985, atau Singapura tahun 1975); juga tampak pada setiap provinsi di mana Maluku mencapai 62,6, GDI 62,6, GEM 51,8, selain HPI (Human Poverty Index) yang rendah yaitu 22,9 (Kompas, 2004), dengan tingkat kemiskinan mencapai 48,12 persen (Kompas, 2005). Khusus untuk kabupaten Maluku Tenggara, Laporan IPM Indonesia dari UNDP menempatkannya pada urutan 105 diantara Kabupaten se-Indonesia dalam hal peningkatan partisipasi dan pelibatan perempuan dalam pembangunan atau pembangunan yang responsif gender, juga menempati urutan terendah di Maluku dalam hal yang sama (Ufi, 2005), dengan tingkat kemiskinan 37,68 persen (Kompas, 2005).

Data ini mengindikasikan buruknya kondisi dan wajah pembangunan gender di kabupaten Maluku Tenggara, termasuk pulau Kei Kecil, sekaligus mengindikasikan urgensi kebutuhan dan agenda pembangunan yang sensitif gender. Meliputi pengarusutamaan gender sektor pertanian dan agribisnis. Ngamelubun (2004) mengatakan, semestinya dan sudah saatnya kaum perempuan Kei dapat dilibatkan dalam jalur utama proses-proses publik secara lebih sengaja dan sistematis. Pendekatan yang memperhitungkan hubungan konstruksi politik, ekonomi dan sosial pasca-konflik; di mana perempuan dan lelaki hendaknya mengidentifikasi identitas-identitas dan peran-peran baru (Hartaningsih, 2005). Penting adanya penguatan usaha kelompok perempuan yang menantang subordinasi dan diskriminasi gender; perempuan yang bisa berusaha dan bekerja sendiri (*self-employment*, dalam industri pangan misalnya) akan mengurangi tekanan dan ketergantungan terhadap lelaki (Hardaputranta, 1997).

Menkokesra Alwi Shibab (Kompas, 2005) menegaskan pada "Lokakarya Pengembangan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD) dan Pencapaian MDGs di Provinsi Pasca-konflik" yang diikuti peserta dari lima provinsi termasuk Maluku, bahwa *saatnya kita berfikir ulang secara komprehensif dan strategis untuk memperbaiki kesalahan dari cara-cara kita pada masa lalu dalam membangun*. Tantangan kita ke depan adalah mengubah pola pikir untuk bersikap terbuka dan melihat kenyataan yang ada di masyarakat. Erna Witoelar (Kompas, 2005) menambahkan, penanganan akar-akar masalah konflik pada pasca-konflik haruslah secara komprehensif dengan membangun konsensus bersama, melalui partisipasi semua pelaku termasuk perempuan. Solidaritas MDGs dari negara maju untuk membantu daerah konflik seperti Maluku, mempersyaratkan acuan dokumen SKPD yang didesain secara partisipatif-bottom up dan sensitif gender (fokusnya pedesaan), di mana berbeda dengan pendekatan top down yang terbiasa disusun Pemda selama ini (Lende Dapa dalam Siwalima, 2005). Mengingat, area MDGs mulai dari kemiskinan, kelaparan, pendidikan dasar, kematian anak, kesehatan ibu, hingga keberlanjutan lingkungan, serta rehabilitasi sumber daya yang hilang, berwujud perempuan pedesaan (Sagala, 2005).

Telah diingatkan oleh Retraubun (Ambon Ekspres, 2005) bahwa potensi konflik antar warga terkait kelangkaan sumberdaya alam pulau kecil rentan terjadi di kabupaten Maluku Tenggara, seperti yang terjadi di Debut, karena pulau kecilnya banyak, begitu pula dengan karakteristik hak ulayatnya. Sumber daya alam dan lingkungan merupakan aspek yang paling penting dalam perdamaian, karena begitu sumber daya alam menjadi langka, maka rakyat atau bangsa-bangsa saling berkonflik (Maathai dalam Kompas, 2004). Sehingga harus diantisipasi sejak dini pada pasca-konflik oleh Pemda Maluku dan Pemkab, melalui kebijakan publik yang komprehensif. Perbaikan ekologi di sini adalah kunci efektivitas bantuan atau intervensi (Kompas, 2005). Kendati ada praktek budaya kekerabatan dan kekeuargaan lokal, yang memungkinkan terjadi pola pertukaran dan saling membantu antar famili dan kerabat (Laksono, 2002). Sibuea (2005) menambahkan, pola kekerabatan yang masih kental sekarang memungkinkan mengalirnya bantuan diantara anggota keluarga (semacam *social safety net* menurut penulis), namun patut dicatat bahwa pola kekerabatan ini memiliki batas daya tahan, dan pada waktunya dapat meledak menjadi gejolak yang besar.

Indraswari (2005) mengatakan, walaupun nilai sosial budaya menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama, tetapi dalam praktek kaum istri/perempuan adalah pihak yang seringkali berada pada posisi "terjepit" untuk berwirausaha karena merekalah yang berhadapan langsung dengan anak dan anggota keluarga lain yang tetap harus dipenuhi kebutuhannya. Kenaikan angkatan/tenaga kerja perempuan seperti ini, dapat merupakan indikator kehidupan lebih berat yang harus dipikul perempuan (Wahono dalam Hartaningsih, 2005). Yang dikenal dalam pepatah Kei sebagai *Yan Vat Sarbaran* atau *Vat Sarbaran*. Hal mana, tingkat partisipasi perempuan (misalnya dalam agribisnis skala kecil) yang meningkat, sejalan pula dengan penambahan penghasilan keluarga (Kensuratiyah, 1997); berikut kedamaian hakiki serat keamanan berkelanjutan, dan sebaliknya.

Sejumlah hasil penelitian menyimpulkan bahwa kaum perempuan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat (Khudori, 2002). Khusus segmen terbesar dari populasi yang tergantung pada pengetahuan lokal-indigenous yang subsisten dengan income dibawah garis kemiskinan, dimana tidak dapat mengakses produk-produk dan barang-barang yang ada di pasar modern (Kuramoto dan Sagasti, 2002). Khudori (2002) melaporkan, produktifitas pertanian meningkat drastis, jika kaum perempuan memperoleh sarana produksi setara laki-laki; jika perempuan memperoleh tingkat pendidikan, pengalaman, dan sarana produksi setara kaum lelaki, mereka dapat meningkatkan produksi jagung dan sayuran sebesar 22% (bandingkan dengan pertumbuhan 3,52% yang jadi sasaran akhir program revitalisasi pertanian). Penurunan kesenjangan gender di bidang pendidikan/pelatihan terbukti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga perebaikan/revitalisasi yang mengurangi ketidakadilan gender dalam akses sumberdaya pertanian/agrobisnis membuat keluarga lebih sejahtera (Aristiarni, 2004). Meliputi pemberian kredit (Firdaus, 2005); inovasi teknologi dan manajemen usaha (Hardaputranita, 1997); atau hal-hal teknis dan struktural (Firdaus, 2005).

Sehubungan dengan hal yang terakhir, Sagala (2005) menegaskan, persoalan perempuan pedesaan dan kedaulatan pangan mestinya dilihat terkait dengan kebijakan pemerintah yang mengabaikan kedaulatan perempuan atas bumi, air, dan kekayaan alam negeri ini, yang berarti merampas hak perempuan atas ekonomi, sosial, budaya, sipil, politik, kesehatan, dan bebas dari kekerasan. Pembangunan dan globalisasi sekarang meningkatkan ancaman lingkungan, terutama terhadap kaum perempuan dan anak, karenanya perempuan harus dikuatkan dalam mengelola sumberdaya alam (Kompas, 2005). Mengingat kesetaraan dan keadilan gender di sini merupakan salah satu prasyarat utama dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan (Pambudy, 2005). Sehingga kita perlu melihat masalah pangan/agrobisnis berbasis sumber daya lahan pulau kecil dan kesetaraan perempuan lebih tajam, karena kemandekan yang terjadi kini banyak diakibatkan oleh kekeliruan cara pandang.

Perlu adanya gerakan pengarusutamaan gender, yang intinya membuka kesempatan dan dukungan terhadap kontribusi perempuan, dari pada sekedar mengasumsikan perempuan juga mendapat keuntungan yang sama apabila ada intervensi pembangunan (Aristiarni, 2004). Seperti RH, dengan pola umum membantu keluarga petani melalui "kepala rumah tangga" yang diklasifikasikan sebagai lelaki sekalipun secara fisik tidak ada di rumah, dari faktanya justru masukan kerja dari produksi pangan disumbang oleh perempuan tetapi jarang sekali disertakan dalam program pelatihan misalnya (Khudori, 2002). Perlu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta aspek kecukupan gizi di dalam ketahanan pangan, merupakan tantangan utama yang diidentifikasi pada WFS: fyl 2002 (*World Food Summit: five years later*) dalam upaya pencapaian sasaran 2015 (Suryana, 2002).

Rekonstruksi lingkungan, sosio-budaya dan ekonomi, diterapkan Maathai (Kompas, 2004) dengan pendekatan holistic, yang sekaligus merangkul demokrasi, dan HAM khususnya hak-hak perempuan. Dalam kerangka penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) pada pasca-konflik, yakni "suatu penghidupan yang terdiri dari sejumlah kemampuan, asset (termasuk sumberdaya material pun sosial-spiritual), dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai perangkat untuk hidup. Suatu penghidupan akan berkelanjutan jika dapat menyesuaikan diri dan pulih kembali dari serangkaian tekanan dan kejutan, kemudian mampu menjaga atau memperkuat lagi kemampuan dan asset yang dimiliki pada saat ini maupun di masa mendatang, sambil tetap tidak melupakan basis sumberdaya alam sekitarnya" (Chambers & Conway, 1992 dalam Thorburn, 2004). Sekurang-kurangnya di dalam pengembangan agrobisnis skala kecil sebagai cikal bakal ekonomi rakyat yang kokoh menurut Dillon (1999). Dengan catatan, suatu usaha pertanian (agrobisnis) skala kecil ini hendaknya mengembangkan suatu *bussines plan* spesifik sebagai suatu *road map* (Hamilton et al., 1992).

Usaha atau industri kecil di sini, merujuk pada SK MenPerindustrian No.150/M/SK/ V/95, meliputi Industri Kecil Menengah dan Industri Kecil, termasuk di dalamnya industri pedesaan dan industri rumah tangga (Andayani, 1997). Sementara agribisnis (agrobisnis), merupakan suatu system terpadu meliputi empat bagian (Saragih, 2002) yaitu, (1) sub-sistem pengadaan sarana produksi, (2) subsistem produksi pertanian atau usahatani, (3) subsistem pengolahan, (4) subsistem distribusi dan pemasaran; terlepas dari komponen/jasa pendukung lainnya. Dukungan pengembangan agrobisnis dari komponen terakhir, mencakup inovasi teknologi yang ramah perempuan (Irianto, 2003) dan ramah lingkungan secara dialogis (Ufie, 2005), dukungan kredit dan pemberdayaan dari LKM (Lembaga Kredit Mikro) maupun Koperasi dan UKM sebagai agen-agen pemberdayaan masyarakat kecil yang didasari keberpihakan kepada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender (Firdaus, 2005), serta perubahan kebijakan dan transformasi sosial ke arah yang lebih adil (Sadhana, 2005).

Dari latar pikiran yang dikemukakan, maka makalah ini mengetengakan bahasan yang berkaitan dengan "Kedamaian dan Pengembangan Agribisnis Skala Kecil Kaum Perempuan" secara komprehensif dan terintegrasi, berdasarkan assesmen yang dilakukan terhadap "Industri Enbal Lempeng dan Kacang Botol di Pulau Kei Kecil". Dalam rangka mendukung revitalisasi pertanian kepulauan kecil dan penghidupan berkelanjutan pada pasca-konflik. Assesmen yang dilakukan terhadap agroindustri kecil yang sensitif gender ini, berpusat pada dua desa utama, dengan menelaah/memotret problema-problema teknis dan struktural yang dihadapi, serta alternatif solusinya yang mengakar pada pengetahuan/ budaya lokal setempat.

BAHAN DAN METODE

Lokasi penelitian yang berpusat pada desa Debut dan Ngilingof di Pulau Kei Kecil, termasuk dalam wilayah pengembangan Gugus Pulau II (GP II).

Secara geologis, teretori petuanan keona desa tersusun dari Terumbu Coral (Batu Kapur), dan sedikit Aluvium Undak di tepi pantai (BPS Kabupaten Malra, 2003), bersama pasir halus ngur blood (*Pasir Panjang Beach*) sebagai suatu objek wisata pantai alami yang berjarak kurang lebih 17 km dari Kota Tual (Muler, 1990). Lahan kedua desa ini yang sebagian besar digunakan sebagai usahatani enbal dan kacang tanah atau subsistem produksi, bervariasi antara Litosol dan Rensina; memiliki dua musim secara teratur yakni Musim Timur atau Musim Kemarau (April – Oktober), dan Musim Barat atau Musim Hujan (Oktober – Februari), sedangkan musim pancaroba atau peralihan pada Maret/April dan Oktober/November (BPS Kabupaten Malra, 2003).

Assesmen partisipatif dialogal yang dilakukan berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, Assesmen Lapangan (*Field Assesment*) di Ngilingof dan Debut pada akhir Desember 2004; kedua Assesmen Lapangan di Kabupaten Maluku Tenggara dan Desa Debut melalui Tim LDP pada 16 – 23 Januari 2005; ketiga Lokakarya kesetaraan perempuan dan laki-laki (*gender equity*) di Wisma Samadi Gonzalo Veloso Ambon pada 24 - 27 Agustus 2005, yang juga melibatkan ibu-ibu dari Kei Kecil. Assesmen Lapangan dilakukan melalui FGD (*Focus Groups Discussion*) dan interview dengan pendekatan *semi-structured & unstructured* (terutama).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari kajian yang dilakukan, diperoleh keterangan bahwa agribisnis skala kecil kaum perempuan dengan komponen industri agro/pangan olahan utama Enbal Lempeng dan Kacang Botol yang cenderung berjalan sendiri apa adanya di Debut dan Ngilingof pada Pulau Kei, tidak berkembang seperti diharapkan karena terhimpit oleh problema-problema klasik yang relatif tidak jauh berbeda. Dalam kondisi seperti sekarang, komoditas berbasis agroindustri yang berpusat di pedesaan, merupakan kekuatan mutlak bagi daerah/Indonesia untuk keluar dari krisis (Sibuea, 2005), dan kerentanan yang ada.

Industri pangan lokal tersebut sebagai bagian industri berbasis pertanian, memiliki mata rantai yang melibatkan banyak pelaku yang menangani langsung atau tidak langsung, mulai dari kegiatan penyediaan sarana dan prasarana, budidaya, pasca panen aan pengolahan, pengemasan dan penyimpanan/penggudangan serta pendistribusian kepada konsumen (Sibuea, 2001). Menurutny, ini menunjukkan keterkaitan erat antara hulu (*on-farm agrobisniess*) yang menghasilkan produk primer pertanian, dengan hilir yang menghasilkan produk olahan (*off-farm agrobisniess*) dan pemasaran, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sekaligus menunjukkan keterkaitan instansi yang menangani dalam suatu sistem terpadu/terkoordinasi, mulai dari hulu (pertanian) dan hilir (perindag), serta instansi pendukung (BPPT, Koperasi dan UKM, LKM dan Perbankan, Kesehatan, Infokom), termasuk instansi yang menangani khusus kewanitaan/ keperempuanan menurut penulis. Keterkaitan ini amat menentukan perkembangan dan daya saing (*competitiveness*) produk primer pertanian (bahan baku) maupun produk olahan lokal/nasional dalam memasuki pasar yang semakin mengglobal (*borderless world*); apalagi adanya dukungan pengendalian mutu yang berorientasi pada standar jaminan mutu (*Quality Assurance, QA*) pada masing-masing mata rantai dalam merebut peluang pasar yang terus berkembang (Sibuea, 2001).

Beberapa problema yang dihadapi agribisnis kaum perempuan tersebut, dapat dikategorikan ke dalam problema teknis agribisnis, dan problema struktural, yang harus diberdayakan/direvitalisasi. Mulai dari tenaga kerja serta modal dan sarana produksi, keterbatasan manajemen usaha, keterbatasan suplai bahan baku dari subsistem produksi, soal kebersihan/kesehatan dalam pengolahan dan pengemasan

(terutama enbal lempeng), standarisasi mutu produk dan labeling. Secara struktural, usaha kaum perempuan yang diases terhiimpit pula oleh beragam hal nonteknis.

Hardaputranta (1997) menegaskan, pemberdayaan usaha kaum perempuan bukan hanya menyangkut penguatan individu (orang-perorang), tetapi juga pranata-pranatanya (system dan strukturnya), pembaharuan kelembagaan, penanaman nilai, peranan masyarakat didalamnya, khususnya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, sekaligus merupakan pembudayaan demokrasi, demikian pula advokasi/pembelaan yang lemah terhadap yang kuat dan persaingan tidak sehat. Pemberdayaan ini tidak boleh membuat masyarakat tergantung pada pemberian. Apa yang dinikmati harus dihasilkan oleh usaha sendiri; sedemikian sehingga manusia menjadi semakin mandiri dan tumbuh dalam harga diri.

Inti dan fokusnya pada pembangunan manusia (Hartaningsih, 2004), lebih berfokus pada *capacity building* lokal sebagai suatu pusat aspek krusial dan pembangunan berkelanjutan (Langil, 1999), atau penghidupan berkelanjutan (*Sustainable livelihood*) pada pasca-konflik (Thorburn, 2004). Seperti pepatah Kei *Tuv Har Vit Ne Mav Derat* (maksudnya rencana/tujuan jangka panjang, tak terbatas) (Renyaa, 1989), dimana semua pihak di Kei yang telah berdamai diharapkan memiliki kearifan baru untuk bertindak lebih hati-hati ke depan (menatap generasi mendatang = *tail u*) dengan berpegang pada pengalaman yang baru saja dilalui (menoleh ke belakang = *savhak muur*) atau lebih dikenal dengan pepatah *Toll U Ne It Savhak Muur*. Dua petua arif ini, mengingatkan semua orang yang hidup di "Kepulauan Kei akan Kelestarian Pulau", *Dok Fo Ohoi Ne Mian Fo Nuhu* (menjadi warga kampung dan menetap di pulau), sejak *Nuhu Enhavet Ne Tan Enharub* (munculnya pulau di atas muka laut dan pembentukan tanah); seperti diisyaratkan pada Pedoman Umum Investasi di pulau-pulau kecil dari Dirjen P3K - DKP (Yun, 2004).

Loekman Soetrisno (dalam Vink, 1984) telah mengingatkan bahwa suatu kelemahan yang ada dikalangan para ahli pertanian kita (Indonesia), adalah lemahnya pengetahuan tentang perkembangan sistem dan pertanian yang ada (*indigenous knowledge & technology*). Atau dianggap sebagai budaya pinggiran. Sementara era globalisasi dan postmodernisme (serta desentralisasi) sekarang, mengizinkan/menghendaki setiap kebudayaan dan tradisi diakui otonom dan nilai khasnya patut dipelihara dan dikembangkan seperti halnya Adat Kei (Ohoitmur, 1996).

Kelemahan tersebut menimbulkan problema tertentu, menyangkut bagaimana kita dapat menciptakan strategi pembangunan/revitalisasi pertanian yang benar-benar didukung oleh budaya pertanian serta institusi yang telah dimiliki oleh rakyat (Loekman Soetrisno dalam Vink, 1984). Merurutnya, penciptaan suatu strategi pembangunan pertanian yang "tepat budaya", merupakan hal yang mutlak diperlukan. Mengingat adanya suatu kebhinekaan/pluralitas dalam organisasi produksi pertanian di negara kita, bahkan satu provinsi atau kabupaten pun sering ditemukan perbedaan yang menonjol. Dengan kata lain, introduksi paket "seragam" secara top down, tidak saja mengakibatkan program inovasi pertanian tidak maju-maju bahkan gagal, tetapi juga membuat masyarakat tani pada kepulauan yang ada kehilangan jati diri (tercabut dari nilai-nilai budaya/kearifan lokal) dan mengalami disorientasi seperti yang banyak disuarakan pada konflik Maluku.

Jika suatu usaha tani di Eropa sangat terikat pada batas-batas yang hanya ditentukan oleh UU, maka untuk Indonesia (terutama Kei) selain terikat pada UU pemerintah, juga terikat pada hukum tak tertulis dari masyarakat setempat; keterikatan di sini adalah suatu keterikatan spiritual (adat), yang berakar pada pandangan-pandangan holistik dan pengetahuan tradisional yang masih berlaku (vink, 1984). Seperti adat Kei, yang ditujukan untuk membentuk masyarakat yang damai diantara sesamanya, dan selaras dengan alam (Thorburn, 2004). Menurutny, Bupati Maluku Tenggara - Husein Rahayaan, pernah mengatakan: "Kalau kami menyebut hukum di Kei ini, yang kami maksudkan pertama sekali adalah *Hukum Adat Larvu! Ngabal*, barulah sesudah itu kami merujuk pada Hukum Agama dari al-Quran dan Injil, terakhir baru kami merujuk hukum Resmi NKRI".

Jadi, dengan menciptakan suatu strategi pembangunan terintegrasi "tepat budaya" (berbasis pengetahuan tradisional-indigenous knowledge), maka tidak hanya kemungkinan pembangunan pertanian akan lebih berhasil, tetapi dapat dihindari pula konflik-konflik yang tidak perlu dengan petani (Loekman Soetrisno dalam Vink, 1984). Dicontohkannya, pada Papua Bagian Tengah, ada tradisi bahwa para wanita khusus menanam tanaman pangan umbi-umbian, sehingga peningkatan produksi/ketahanan pangan lokalnya adalah identik dengan pemberdayaan perempuan, bukannya kaum lelaki yang akan memicu penolakan/konflik dan kegagalan. Karenanya, bahasan berikut diawali dengan suatu ikhtisar tentang tenaga kerja dan manajemen usaha perempuan dalam konteks adat Kei, berikut problema teknik dan struktural lainnya.

1. Tenaga Kerja - Sarana Produksi, serta Manajemen Usaha-Agro Perempuan Kei

Posisi dan peran sentral perempuan Kei dalam usaha pertama bagi kelangsungan hidup keluarga dan masyarakat, terimplisit dalam pepatah Kei. Yakni *Sisian Er Vatvat*, maksudnya rumbiah dan wanita waktu kecil belum nyata gunanya, nanti kalau "sudah besar" baru dirasakan gunanya, dimana "tidak busuk lagi" tetapi baik dan berguna (Renyuan, 1989). Frasa "sudah besar" menurut penulis, dapat dimaknai sebagai sudah berdaya, sudah berada pada arus dan peran utama; sementara frasa "tidak busuk lagi" menunjuk pada tidak "disepeleahkan", tidak bias gender, tidak dilihat dengan mata sebelah".

Untuk kondisi sekarang, usaha/industri Enbal Lempeng dan Kacang Botal di kedua desa masih terbatas dan berjalan apa adanya (masih busuk). Karena keterbatasan modal tenaga kerja, finansial dan sarana produksi, serta manajemen usaha. Agar jadi besar dan kuat (berkembang), tentunya perlu bantuan pemberdayaan instansi terkait, tidak bisa diharapkan terjadi dengan sendirinya. Hardaputranta (1997) menegaskan, untuk membantu kaum perempuan dalam meningkatkan pendapatan, atau lebih tepat kegiatan produksi dan usaha berskala kecil, sering lebih tepat bila kita meningkatkan pilihan teknologi, metode kerja, membantu masukan sumber daya dan pelatihan untuk usaha-usaha yang sekarang sudah mereka jalankan, dari pada mengadakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru. Karena hal (intervensi) seperti ini akan menambahkan beban kerja, dan tidak dapat tahan untuk jangka panjang (cenderung mengejar kepentingan jangka pendek).

Selain dinas pertanian dan ketidakintegrasian program, Soetrisno (2002 dalam Firdaus, 2005) mengatakan, pengembangan UKM sering terkesan "netral/buta jender". Hal ini terlihat jelas dari program Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM dalam aspek nonfinansial maupun finansial yang tidak menyinggung persoalan gender di dalamnya. Antara lain, (1) program penciptaan *business development services* (BDS) yang menyediakan beragam jasa semisal pelatihan manajemen teknis, konsultasi manajerial, perbaikan dan pemeliharaan, desain produk, sertifikasi produk, konsultasi jasa informasi, jasa informasi dan kurir, jasa konsultasi pasar, plaing perdagangan, perpajakan dan hukum misalnya; (2) program percepatan kondisi yang sehat bagi penguasaan teknologi dan pengembangannya, serta penumbuhan aneka kreasi atas penguasaan teknologi komunikasi; (3) program pengembangan UKM model *cluster*, yang berorientasi bisnis dan terfokus.

Hardaputranta (1997) mengingatkan, iklim ekonomi terbuka kini, dimana barang-barang pangan/sandang membanjiri pasar dengan harga murah, disamping iklim budaya para konsumen yang lebih suka barang modern-import, sangat membatasi ruang bagi produk buatan kelompok-kelompok perempuan. Belum lagi soal teknologi yang digunakan yang kurang sesuai, kurangnya jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) dari anggota-anggota kelompok, serta manajemen usaha yang terbatas. Karenanya, dukungan dalam pengembangan usaha, baik aspek nonfinansial (pelatihan kepemimpinan dan manajemen teknis, dan sebagainya) maupun aspek finansial sangatlah diperlukan. Perlu mencetak petani perempuan menjadi wiraswasta agribisnis bermartabat.

2. Suplai Bahan Baku Enbal dan Kacang Tanah dari Substansi Produksi (on-farm)

Posisi sentral kaum perempuan Kei termasuk di dalam usaha tani, dapat dimengerti dari Adat Kei-Larwul Ngabal, khususnya Hukum Hanilit. Hukum Hanilit ini menentukan posisi dan batas moral pergaulan sosial, khususnya hubungan interaksi antara lelaki dan perempuan, dalam rangka pemeliharaan kehidupan yang tertib dan teratur secara kolektif (Ohoitmur, 1983, 1996).

Dalam pandangan orang Kei sebagai petani ladang (lahan kering) mengenai peranan kaum wanita, bisa ditemukan suatu peranan sentral yang diberikan kepada kaum perempuan: pertama-tama dianggap sebagai sumber hidup dan kesuburan; rupa-rupanya keberhasilan dipandang turun dari jasa perempuan (Boelars, 1982 dalam Ohoitmur, 1983). Peranan ini haruslah dilihat juga dalam cahaya religi kosmologis, dimana terjadi pergaulan erat dan mesra antara seluruh anggota kosmos sebagai suatu keluarga besar (dilambangkan dengan perkawinan sakral antara pria dan wanita; suatu kewajiban untuk menghormati kaum perempuan yang setara, baik yang sudah berumah tangga maupun belum) (Ohoitmur, 1983).

Sumber hidup dan kesuburan, serta keberhasilan berladang/berusahatani palikultur alamiah yang terkait dengan jasa perempuan tersebut, secara praktis menunjuk kepada pengetahuan dan teknologi tradisional yang banyak dikuasai kaum perempuan dibandingkan dengan lelaki (lihat Emery, 2000; Langil, 1999). Selain tradisi usahatani skala kecil yang dikembangkan ini tidak begitu terganggu oleh perbedaan tanah dan iklim, tidak saja karena kecilnya, tetapi juga karena perbedaan-perbedaan yang sering terwujud dalam perbedaan mutu hasil panen, bagi usaha kecil ini tidaklah begitu penting (Vink, 1984).

Menurutnya, para petani kecil khususnya kaum perempuan dapat memperhatikan perbedaan dimaksud secara lebih baik, karena mereka terus-menerus bekerja pada tempat/lahan yang tidak luas, jadi perhatiannya tidak terbagi-bagi (seperti skala besar).

Dua contoh pengetahuan/teknologi lokal yang relevan dikemukakan berkaitan dengan aman atau lancar tidaknya suplai bahan baku Enbal Parut (varietas Sawo Pedro Petro-SPP) dan Kacang Tanah (*Arachis hypogea* L., varietas Kidang?) dari subsistem produksi, adalah pengetahuan tentang musim dan kalender tanam, serta kaplingan luasan areal (kebun) yang lasim dan masih dijadikan acuan.

a. Pegangan Musim Secara Tradisional

Secara tradisional orang Kei membagi musim (kalender kegiatan usahatani) dalam 12 bulan tiap tahun sebagai berikut (Ohoitumur, 1996):

Musim Timur (April-Oktober) atau musim kemarau:

- 1) *Urat* (April): angin barat rendah, hujan berkurang; kesempatan memungut hasil kebun musim barat; membuka kebun musim timur (*Urat* juga disebut *Mair*, yakni musim pancaroba).
- 2) *Buut* (Mei): bunga berkembang; ubi dan kombili boleh diambil atau dipanen (pada waktu digali bisa jadi bahwa kayu/tugal penggali kena ubi sampai bergeta, karenanya bulan ini disebut *buut*).
- 3) *Atnemav Teen* (Juni): musim gugur.
- 4) *Atnemav Yanat* (Juli): angin timur bertiup kencang.
- 5) *Hamyarin* (Agustus): angin agak reda, hasil kebun mulai ada.
- 6) *Ngatuar/Ngaluar* (September): mulai buka kebun baru dan dibakar, yang tinggal hanya tunggul-tunggul kayu (*ai tuar*).
- 7) *Ngavohot* (Oktober): dalam bulan ini kacang-kacangan mulai menjadi kering (*ngavohot*, *ngalum*, *tangun*, *lar*); karena terlalu panas kulit kacang pecah dan bijinya gugur.

Musim barat (November-Maret) atau musim hujan

- 1) *Farehe* (November): musim pancaroba; kebun mulai ditanam (*Ngavaar-september*) karena musim hujan telah dekat.
- 2) *Fanii* (Desember): arlinya awan bemyala; waktu awan berduyung-duyung datang dari barat, guntur dan kilat sambung menyambung; tanaman mulai bertumbuh, turun banyak hujan.
- 3) *Amarar* (Januari): keadaan sedikit tenang, hanya langit mendung, mengandung banyak air, tanaman mulai berseri-seri.
- 4) *Toar* (Februari): tanaman mulai menjalar pada tanggul-tanggul kayu di kebun (*toar* = *lilar*).
- 5) *Aturun* (Maret): topan bertiup kencang, guntur dan kilat sambung-menyambung. Orang Kei menyebutnya *enyaduk es u* (*es u* = *laar*).

Catatan :

- Jika pembukaan kebun terlambat ataupun penanaman terlambat (antara lain karena keterbatasan pengadaan bibit luar dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, atau Dana Dekon Pusat, seperti kacang tanah), maka jelas membatasi suplai bahan baku. Orang Kei menyebutnya *Tangun Har Mur* (menanam kacang hijau terlambat waktunya), atau *Taha Sum* (menangkap burung bangau) yang menunjuk pada usaha/perjuangan yang tidak berhasil (Renyaa, 1989).
- Pengetahuan lokal orang Kei tentang waktu tanam atau *planting date* (*Farehe-November*) adalah mirip dengan rekomendasi FAO (dalam LTA-72, 1987), yakni "permulaan musim tanam harus kurang dari 30 hari sebelum dimulainya periode basah". Ini harus diperhitungkan untuk penanaman kacang tanah varietas Kidang berumur 100 hari misalnya (Fachruddin, 2000); termasuk enbal parut atau ubi kayu varietas SPP (Rukmana, 1997) berumur 9-10 bulan misalnya.
- Pengalaman orang Kei dalam usahatani (budidaya) polikultur/diversifikatif secara alami dengan bibit dari luar dapat terungkap melalui pepatah. Antara lain, *Harubun Star Mav*, maksudnya bertumbuh subur dan lekas berbuah, lalu lekas mati juga (Renyaa, 1989), atau tidak tahan terhadap kondisi lokal yang unik.

b. Luasan dan Ukuran Areal Lahan Kebun

Secara tradisional orang Kei menerapkan satuan luas khusus untuk ukuran kebun (bukan Areal atau Hektar yang dikenal), yaitu *Kidin* dan *Ngel*. Setelah dibersihkan dari sisa-sisa bakaran, bidang tanah yang dijadikan kebun dibagi-bagi atas bagian-bagian besar yang disebut *Kidin*; setiap *Kidin* terdiri atas 10 bagian kecil yang disebut *Ngel* (ukurannya rata-rata 9 x 3 meter) (Ohoitumur, 1996). Dengan demikian maka suatu ladang/kebun bisa terdiri atas 5 *Kidin* yang berarti 50 *Ngel*.

Pembagian lahan kebun atas Kidin dan Ngel ini, merupakan kearifan lokal orang Kel dalam perencanaan dari alokasi tanaman (penatagunaan lahan) secara polikultur. Ohoitmur (1996) menerangkan, petani Kel lebih cenderung pada kebun atau ladang heterogen untuk kebutuhan ekonomi keluarga, seperti ubi kayu (*enbal*), kacang tanah (*uasin*), jagung (*eslar*), petatas (*enmav*), keladi (*menad*), labu (*lam*), dan kacang hijau (*tangun*) misalnya. Pembagian bisa terjadi sebagai berikut: satu kebun terdiri dari 2 Kidin (20 ngel) *enbal*, 3 ngel ubi, 2 ngel kacang tanah, 1 ngel bawang merah, misalnya: diantara ngel dan kidin lasim ditanam tanaman-tanaman tertentu (papaya, tebu, cili, terong, bahkan pisang) yang berfungsi sebagai pembatas selain fungsi ekonomis dan ekologis. Pembagian kebun atas sejumlah kidin berfungsi sebagai prioritas, di mana bisa jadi satu kebun terdiri dari 2 kidin *enbal*, 2 kidin kacang tanah, dan beberapa ngel tanaman lainnya. Pada akhir penanaman segera diikuti tahap pemeliharaan, di mana hal terpenting adalah mengerjakan pagar (*ngean*, *lutur*, dan *bangir*) mengelilingi seluruh kebun, guna mencegah tanaman dari bahaya babi hutan yang bisa menghabiskan seluruh tanaman dalam waktu semalam saja.

Catatan:

- Satu Ngel (9 x 3 meter) lebih kecil dari satu Are (10 x 10 meter), begitu pula dengan satu Kidin (10 ngel = 90 x 30 meter) lebih kecil dari satu Hektar (100 x 100 meter). Selain variasi dalam jarak tanam, Artinya produktivitas tanaman (*enbal* dan kacang tanah) dan pasokan bahan baku dalam satuan Ngel dan Kidin pasti lebih kecil dari Are dan Hektar (terlepas dari perlakuan teknis agronomis atau budidaya mencakup penggunaan bahan organik/kompos dan sebagainya). Kecuali diadakan inovasi teknologi berbasis pengetahuan tradisional ini dalam peningkatan produktivitas Ngel dan Kidin agar berdaya saing yang mengakar pada budaya lokal.
- Sebagai gambaran: *enbal* varietas SPP, produksi per hektar (t/ha) 20-25, dengan kadar karbohidrat 27, 0%, HCN 150 mg, rasa amat pahit, jarak tanam 50 x 50 cm atau 80 x 80 cm bahkan 90 x 10 cm (Rukmana, 1997); kacang tanah varietas Kidang, produksi per hektar (t/ha) 1,5 - 1,7, dengan jarak tanam 30 x 20 cm atau 20 x 20 cm (Fachrudin, 2000).

Dalam era globalisasi ini, produksi dan perdagangan komoditas pertanian menghadapi persaingan yang semakin ketat. Sehingga penerapan praktek pertanian yang baik merupakan suatu alternatif guna memproduksi komoditas bermutu tinggi, terjamin, aman, efisien, berwawasan lingkungan dan dapat dirunut kembali (*traceable*) asal-usul dan proses yang dilakukan sebelum diperdagangkan dan dipergunakan (Sudarto, 2004).

3. Pengolahan, Pemasaran *Enbal* Lempeng dan Kacang Botal Perempuan Kel

Keterbatasan pengolahan dan pengemasan (kebersihan dan kesehatan) yang terkait dengan pengendalian mutu bagi keamanan pangan (*food security*) dan labeling, distribusi dan pemasaran, telah disinggung sepintas pada poin 1. Sibuea (2001) mengatakan, industri pangan kecil yang belum menerapkan sistem jaminan mutu atau belum menjalankan secara baik sistem pengendalian mutu yang menjamin keamanan pangan, akan menghadapi tantangan berat di dalam perkembangan ke depan.

Diingatnya, kecenderungan masyarakat/konsumen sekarang ke depan yang lebih peduli terhadap nilai kesehatan, menyebabkan persyaratan pangan bukan saja harus bergizi tinggi, tetapi juga harus aman dikonsumsi dan bermutu baik. Artinya, harus kembali ke praktek pertanian alamiah dan produk olahan organik yang baik, menurut penulis. Sibuea (2001) menambahkan, jika suatu pangan sudah tidak aman dikonsumsi (atau diragukan keamanannya), maka kandungan gizi, kelezatan dan penampilan kemasan yang menarik tidak ada artinya lagi. Penerapan sistem jaminan mutu dalam industri pangan ini, mulai dari tingkat produksi primer (usahatani), serta pengolahan dan distribusi, diyakini dapat menjamin keamanan pangan, sekaligus daya saing usaha ke depan.

Produk olahan pangan lokal/nasional, khususnya yang diproduksi industri kecil dan rumah tangga, secara tak sengaja terus tersingkir dari pasar karena kurang promosi, selain suatu standarisasi yang baik (seperti halnya McDonald's, dimana-mana lesatnya sama) (Sibuea, 2002). Orang jaman sekarang ini lebih percaya pada pangan yang berlabel: akal sehat masyarakat, terutama di perkotaan, sudah terkurung oleh labelisasi; sehingga pangan lokal yang bebas label tidak mendapatkan perhatian, apalagi penghargaan (Turang, 2005). Dikatakannya pangan lokal kurang diterima di mall karena tidak mempunyai label; makanan sehat dari lingkungan setempat dianggap sebagai sesuatu yang dicurigai, karena tidak mendapat hasil kajian sejenis ISO (Quality Management-ISO9001: 2000, Environmental Management-ISO14001: 2004, Ekolebel Manufaktur, Label Hijau Pertanian Organik misalnya) menurut pandangan masyarakat modern. Jadi, globalisasi ini juga memberi kesempatan untuk mengembangkan produk olahan pangan lokal-tradisional, sepanjang mutunya terjamin dan harganya terjangkau (Sibuea, 2002).

4. Kecenderungan Hambatan Struktural Ranah Pemerintah

Dalam menjalankan usahanya, perempuan pengusaha (agroindustri) skala kecil terhimpit oleh dua problem struktural sekaligus, antara lain beragam kebijakan pemerintah berupa peraturan pusat dan daerah yang tidak adil, terlepas dari posisi perempuan pada ranah keluarga dan masyarakat (Firdaus, 2005). Sejak Orde Baru, berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan untuk meningkatkan produksi pangan berwawasan agribisnis, sekaligus meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani; masalahnya adalah, desain kebijakan dan program tersebut masih didominasi oleh kaum lelaki seperti RH yang bermuatan patriarki atau bias gender (Khudori, 2002).

Hal tersebut juga terlihat dari program Menteri Negara urusan Koperasi dan UKM yang didesain dengan cara pandang netral gender atau buta gender (Firdaus, 2005). Dicontohkan bahwa, situasi perempuan pengusaha kecil/mikro dan lelaki dilihat tanpa memandang adanya persoalan krusial yang khas pada masing-masing. Begitu pula dengan aspek pembiayaan, di mana pelaku UKM difasilitasi dengan pemberian kredit tanpa mempertimbangkan kesetaraan gender. Hal-hal seperti ini pun menyebabkan pengusaha agroindustri perempuan di Kei kesulitan modal untuk pengadaan tempat usaha yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang diharapkan.

Selain apa yang dikemukakan, ada kecenderungan bahwa instansi pemerintah yang membuat kebijakan dan program untuk mengembangkan produk lokal di Indonesia, khususnya produk usaha kecil dan menengah, belum terfokus dan tersistem dengan peran dan tugas yang jelas (Kompas, 2005). Akibatnya, program pengembangan pangan lokal tidak konsisten dan terprogram untuk jangka panjang. Jika tidak ada instansi atau sistem koordinasi dalam menangani khusus pengembangan produk lokal berfokus agroindustri skala kecil seperti halnya Enbal Lempeng dan Kacang Botol, maka produk lokal karya perempuan-perempuan Kei ini akan tetap tertinggal dan terus termarginalisasi.

Kordinasi fungsi pelayanan-pelayanan dasar ini setiap tahun melalui Forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebelum MUSRENBANGDA (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah), namun Forum SKPD Pertanian ini cenderung terfokus pada produksi primer (Pertanian – Peternakan, Perkebunan – Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, BPTP). Kiranya forum kordinasi program teknis ini dikembangkan ke depan menjadi Forum SKPD Agribisnis (yang juga melibatkan Perindag, Koperasi dan UKM, Perbankan, Kesehatan/POM, Infokom).

5. Inovasi Teknologi Ramah Perempuan Berwawasan Agribisnis Kepulauan

Reorientasi kegiatan riset dalam efisiensi penggunaan dana, bagi pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat saat ini, terutama pangan dan kemiskinan; tidak saja terbatas pada kreasi teknologi agroindustri (agribisnis) skala kecil, pengembangan sumber daya lahan pulau bagi aktifitas on farm, pengkajian kebijakan teknologi dan pengembangan wilayah kepulauan (gugus pulau), tetapi juga hendaknya ramah perempuan atau berkesetaraan gender agar lebih bermakna.

Irianto (2003) menegaskan, walaupun kegiatan pengambilan air, penyiraman, penyiangan, pemupukan, pengendalian hama/penyakit, panen dan pemasaran, sebagian besar dilakukan oleh perempuan, sampai saat ini masih terlihat dominannya konsep, strategi, rancang bangun dan rekayasa teknologi yang masih bias gender. Box (1999) mengatakan, dialog-dialog partisipatif bagi prioritas penelitian, membutuhkan kompetensi mendengarkan dan partner-partner formal. Menurutnya hingga kini, jarak antara mereka yang memproduksi teknologi grassroot informal di pedesaan (didominasi kaum perempuan), dan mereka yang bekerja pada pengembangan teknologi pertanian formal (kebanyakan kaum pria) belum terjembatani secara baik. Pengetahuan dan jasa-jasa *indigenous* mereka hanya terdapat dalam komunitas desa, dan biasanya dikembangkan di luar sistem formal yang ada (Kuramoto dan Sagati, 2002). Diingatkannya, pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pengetahuan masyarakat tidaklah seragam tetapi kombinasi dari pengetahuan dan ketrampilan lokal-tradisional (80 persen populasi) dengan yang modern (20 persen), di mana kebijakan atau program inovasi yang cenderung lebih mempromosikan pengetahuan dan teknologi modern dengan mengabaikan pengetahuan/budaya lokal yang dominan (dikuasai kaum perempuan), menghasilkan ketergantungan pada pengetahuan dan teknologi impor serta *incapacity* untuk mengkreasi suatu basis pengetahuan/budaya lokal. Bagi peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani serta kedamaian hakiki.

Pada saat yang sama, kebijakan seperti ini yang bias gender, ikut mendorong kehilangan pengetahuan/budaya lokal bernilai, yang dapat memperbaiki kapasitas dan kualitas hidup berbagai sektor dari populasi yang ada. Sagala (2005) menegaskan bahwa sejak RH (bermuatan patriarki),

perempuan yang sebelumnya berdaulat atas praktek pertanian alami, mulai dari pemilihan benih (lokal), menanam, menyangi, membuat pupuk organik, memanen dan sebagainya tersingkir. Marginalisasi peran perempuan yang tak terdeleksi, dalam jangka panjang tidak menguntungkan semua pihak karena akselerasi pembangunan hanya bertumpu pada kaum pria, sementara perempuan yang secara kuantitas lebih banyak dan secara kualitas dapat memainkan peran strategis secara proporsional, belum mendapat peran (Irianto, 2003).

Kondisi seperti ini di AS, direspons melalui *The Women's Network*, di mana anggota-anggota mendemokratisasi pengetahuan tentang hubungan-hubungan sosial dalam pertanian dengan mengembangkan sharing pengetahuan personal setiap anggota seputar diskriminasi gender dalam pertanian (Hassanein, 2000). Dikatakannya, partisipasi dalam network ini lebih menekankan sharing dan kesetaraan (dialog budaya), pendekatan ini menolak aliran informasi/inovasi unidireksional dari ekspert ke non ekspert (petani perempuan). Misalnya para ilmuwan/peneliti di Afrika Selatan, yang membantu kaum perempuan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan tentang dampak lingkungan/ekologi dari cara atau kebiasaan on farm mereka; ini adalah lebih baik maknanya dari pada hanya mengatakan kepada mereka apa yang harus dilakukan (Kompas, 2005).

Inovasi teknologi pertanian/agrobisnis yang ramah perempuan dan lingkungan seperti pengembangan lahan kering dengan cara diversifikasi komoditas (Irianto, 2003). Merupakan model pertanian alternatif berwawasan gender, yang sedikit banyak memerlukan pendamping partisipatif (Tjahjadi dan Gayatri, 1997). Misalnya dalam proyek Usahatani Berkonservasi di Lahan Kering Kritis (Wijaya, 1997), termasuk pascapanen yang kenyataannya banyak digeluti oleh kaum perempuan (Kensuratiyah, 1997). Tjahjadi dan Gayatri (1997) menegaskan, pengembangan model pengelolaan pasca-produksi/panen berwawasan gender ini memerlukan gagasan dan uji coba yang terus menerus secara dinamis, mengingat adanya konsep keamanan pangan dan pemasaran alternatif. Mencakup labeling, mengingat masyarakat jaman sekarang lebih cenderung menggunakan pangan berlabel dalam memenuhi keperluan rumah tangga (Turang, 2005).

Apabila agrobisnis diversifikatif tersebut bisa memberi manfaat secara ekonomi dan berdaya tarik wisata, maka jadilah ia agrowisata (Ufie, 2005; Wididana dan Higa 2000/2001). Sekaligus bermanfaat bagi kedamaian pasca-konflik berkelanjutan. Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Saifullah Yusuf (Kompas, 2005) mengakui, konflik di beberapa daerah termasuk Maluku (khususnya Kei) memang masih ada, setidaknya potensial untuk muncul kembali, jika tidak diselesaikan akar penyebabnya. Salah satu alternatif solusi yang bermakna adalah melalui pengembangan agrobisnis skala kecil berbasis kaum perempuan (*peace through women agrobusiness development*).

KESIMPULAN

Premis utama revitalisasi pertanian dan agrobisnis, adalah pembangunan manusia dari di pedesaan yang sensitif gender (GDI & GEM). Sehingga inovasi teknologi pendukung yang dikembangkan adalah *people-centered/driven* yang ramah perempuan dan ramah lingkungan kepulauan kecil, khususnya yang dibutuhkan industri kecil termasuk agroindustri Enbal Lempeng dan Kacang Botol skala kecil perempuan Kei. Agar lebih berbasis dan bermakna serta efisien.

Untuk situasi pasca-konflik, pendekatan pembangunan dan penelitian partisipatif berbasis manusia yang ramah perempuan tersebut tidak saja dapat meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, tetapi juga memenuhi sasaran dari MDG's sebagai instrumen untuk mencegah timbul kembali konflik dan kekerasan antar warga terkait kelangkaan sumber daya alam pulau kecil. Apabila agrobisnis diversifikatif alami ini bisa direvitalisasi dalam memberi manfaat secara ekonomi, sekaligus berdaya tarik wisata karena keunikannya yang khas, maka jadilah ia agrowisata idaman sebagai sektor jasa vital bagi penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) wilayah kepulauan.

Revitalisasi tersebut hanya dapat efektif, jika produk lokal khususnya agroindustri/ agrobisnis skala kecil dan agrowisata dijadikan fokus pengembangan daerah kepulauan secara sistem dan terkoordinasi dengan peran dan tugas stakeholders utama yang jelas. Keterkaitan instansi dalam suatu sistem terpadu ini, mulai dari hulu dan hilir serta pendukung-pendukung, termasuk yang menangani khusus keperempuanan. Karenanya, perlu koordinasi instansi daerah yang terkait, di dalam memprioritaskan dan mensinkronisasi layanan-layanan dasar yang bermartabat setiap tahun melalui Forum SKPD Agrobisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambon Ekspres. 2005. Kasus Debut Bisa Terulang. *Harian Lokal*, edisi 9/5/2005. Ambon.
- Andayani, S. 1997. Pemasaran Hasil Usaha Produksi Kelompok Perempuan/Wanita. Dalam LPPS (ed.) Meningkatkan Kemandirian Lokal Usaha Perempuan. Seri Forum LPPS No.39. Jakarta.
- Aristiarni, A. 2004. Merefleksikan Kesejahteraan Perempuan Dalam Angka. *Kompas, Harian Nasional*, edisi 6/11/2004. Jakarta.
- Box, L. 1999. *The Toils and the Spoils: Knowledge of Soil and Soil of Knowledge*. ECDPM. Maastrich-The Netherlands.
- BPS Kabupaten Malra. 2003. Maluku Tenggara Dalam Angka. BPS Malra. Tual.
- Dillon, H.S. 1999. Petani Dahulu, Baru Agribisnis. *Kompas, Harian Nasional*, edisi 6/4/1999. Jakarta.
- Ely. 2005. Revitalisasi Pertanian Baru Daftar Keinginan. *Kompas, Harian Nasional*, edisi 2/2/2005. Jakarta.
- Emery, A. R. 2000. Integrating Indigenous Knowledge in Project Planning (Guideline 4: The Traditional Knowledge of Women May Be Different From That of Man). Partnership Publication of the ILO-The World Bank-CIDA-Kivu Nature Inc. Washington DC.
- Fachrudin, L. 2000. *Budi Daya Kacang-Kacangan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Fer. 2005. Usaha Kecil: Tak Jelas Instansi Mana Yang Kompeten Tangani Produk Lokal. *Kompas, Harian Nasional*, edisi 2/8/2005. Jakarta.
- Firdaus, M. 2005. Aspek Keadilan Gender Pada Lembaga Kredit Mikro. *Kompas, Harian Nasional*, edisi 7/3/2005. Jakarta.
- Hamilton, W.H., Connelly, D.F., Dosier, D.H. *Agribusiness-An Entrepreneurial Approach*. Delmer Publisher Inc. New York.
- Hardaputra, R.H.S.J. 1997. Program Mitra Mandiri. Dalam LPPS (ed.) Meningkatkan Kemandirian Lewat Usaha Kecil. Seri Forum LPPS No.39. Jakarta.
- Hartaningsih, M. 2004. LPMI-2004: Solusi Birokrat Membiayai Pembangunan Manusia. *Kompas, Harian Nasional*, edisi 6/11/2004. Jakarta.
- Hartaningsih, M. 2005a. Perempuan, Aktor Utama Rekonsiliasi. *Kompas, Harian Nasional*, edisi 28/2/2005. Jakarta.
- Hartaningsih, M. 2005b. Perempuan, Agen Perdamaian? Dalam Scharlet, F. (Penerjemah) *Pengarusutamaan Gender dalam Upaya Membangun Perdamaian: Kerangka Untuk Bertindak (Mainstreaming Gender in Peace Building: A Framework For Action)* (Pankhurst, D. & Adelin, S. 2002). Griya Upakara. Jakarta.
- Hassanein, N. 2000. Democratizing Agriculture Knowledge Through Sustainable Farming Network. In Kleinman, D.L. (ed.): *Science, Technology And Democracy*. State University of New York Press. Albany.
- Ida, L. 2003. Posisi Perempuan Dalam Otonomi Daerah-Dan Formalisasi Syariah Islam. *Kompas, Harian Nasional*, edisi 3/2/2003. Jakarta.
- Indraswari. 2005. BBM dan Perempuan. *Kompas, Harian Nasional*, edisi 8/10/2005. Jakarta.
- Irianto, G. 2003. Perempuan pada Pertanian Lahan Kering. *Kompas, Harian Nasional*, edisi 8/11/2003. Jakarta.
- Kensuratayah. 1997. Gender dan Pertanian. Dalam Andayani, S. dan Setiyoso, Y. (eds.) *Rekonstruksi Realitas Dengan Perspektif Gender*. SBPY dan OXFARM UK/I. Yogyakarta.
- Khudori. 2002. Perempuan dan Ketahanan Pangan. *Kompas, Harian Nasional*, edisi 28/1/2002. Jakarta.
- Kompas. 1999. Nanere dan Pertanian Kepulauan. *Harian Nasional*, edisi 26/1/1999. Jakarta.
- Kompas. 2000. Akibat Konflik SARA 816.993 Orang Mengungsi. *Harian Nasional*, edisi 3/8/2000. Jakarta.
- Kompas. 2004a. WM Maathai, Penerima Nobel Perdamaian. *Harian Nasional*, edisi 9/10/2004. Jakarta.
- Kompas. 2004b. Menanti Lonjakan Kualitas Bangsa. *Harian Nasional*, edisi 6/11/2004. Jakarta.
- Kompas. 2005a. Indonesia Alami Kemunduran-Dalam Pembangunan Manusia. *Harian Nasional*, edisi 15/3/2005. Jakarta.
- Kompas. 2005b. Tingkat Kemiskinan di Maluku Capai 48,12 Persen. *Harian Nasional*, edisi 17/3/2005. Jakarta.
- Kompas. 2005c. Area Kekerasan Itu Berada di Rumah, Kebun, dan Pekarangan. *Harian Nasional*, edisi 24/3/2005. Jakarta.
- Kompas. 2005d. Libatkan Perempuan Dalam Mengelola Sumber Daya Alam. *Harian Nasional*, edisi 31/8/2005. Jakarta.
- Kompas. 2005e. Perbaiki Ekologi: Kunci Efektivitas Bantuan. *Harian Nasional*, edisi 15/10/2005. Jakarta.
- Kompas. 2005f. Pembangunan Daerah: Potensi Konflik Masih Besar, Perlu Penciptaan Rekonsiliasi. *Harian Nasional*, edisi 19/10/2005. Jakarta.
- Kuramoto, J. and Sagasti, F. 2002. Integrating Local and Global Knowledge, Technology and Production Systems: Challenges for Technical Cooperation. *Science, Technology & Society* 7: 2 (2002).
- Laksono, P.M. 2002. *The Common Ground in the Kei Islands: Eggs from One Fish and One Bird*. Galang Press. Yogyakarta.
- Langil, S. 1999. *Indigenous Knowledge: A Resource Kit for Sustainable Development in Dryland Africa (2.2. Gender Sensitivity)*. Research Officer-People, Land and Water-IDRC. Ottawa, Ontario.
- Leclerc, A. 1974. *Parole de Femme*. Edisi Indonesia oleh Hidayat, R. S. 2000. *Kalau Perempuan Angkat Bicara*. Kanisius. Yogyakarta.
- Lie, A. 2004. Media, Sentra Ke 4 Pendidikan. *Kompas, Harian Nasional*, edisi 7/9/2004. Jakarta.
- LTA-72. 1987. *Daerah Agro-Klimatik Dari Provinsi Maluku (Agro-Climatic Zones Of The Maluku Province)*. Maluku Regional Planning and Development Project. Ambon.
- Luhukay, S. 2000. Perempuan dan Konflik Maluku. *Siwalima, Harian Lokal*, edisi 20/6/2000. Ambon.
- Muller, K. 1990. *Maluku-The Moluccas: Indonesia Travel Guides*. Periplus Editionis. Singapura.

- ✓ Oholitmur, Y. 1963. Beberapa Sikap Hidup Orang Kei: Antara Ketahanan Diri Dan Proses Perubahan. Thesis Sarjana (tidak dipublikasikan). STS Pineleng, Manado.
- ✓ Oholitmur, Y. 1996. Hukum Adat Dan Sikap Hidup Orang Kei. Kelompok Studi Communicanda, Pineleng-Manado.
- Ngamelubun, M. 2004. Di Belakang Layar: Perempuan Dalam Konflik dan Proses Rekonsiliasi Di Kepulauan Kei. Dalam Laksono, P.M., Topatimasang, R. (eds.) *Ken Sa Faak: Benih-benih Perdamaian dari Kepulauan Kei*. Nen Mas II-INSIST Press. Tual - Yogyakarta.
- Pambudy, N. M. 2005. Anggaran Berperspektif Jender, Mungkinkah? Kompas, Harian Nasional, edisi 24/9/2005. Jakarta.
- Putnarubun, E. Ch. 2005. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Usaha Industri Enbal Lempeng Di Desa Ngilingof Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Program Studi Sosial Ekonomi-Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian UNPATTI, Ambon.
- Renyaan, Ph. 1989. *Misil-Ma'sal*. Liat-Dall, Sukat-Sarang, Evav, Seminar Santo Yudas Tadeus, Langgur.
- Rukmana, R. 1997. *Ubl Kayu: Budi Daya dan Pascapanen*. Kanisius, Yogyakarta.
- Sadhana. 2005. Kondisi Perempuan Memprihatinkan. *Sadhana* 240 Thn 2005. Semarang.
- Sagala, R. V. 2005. Wajah Terabaikan Perempuan Pedesaan. Kompas, Harian Nasional, edisi 22/10/2005. Jakarta.
- Sanjaya, R. 2004. Jika Inovasi Berhenti, Peradaban Manusia Berakhir. Kompas, Harian Nasional, edisi 22/10/2005. Jakarta.
- Saragi, B. 2002. Kebijakan Lahan Kering Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Makalah Menteri Pertanian pada Lokakarya Kurikulum Inti Fakultas Pertanian se-Indonesia, Tanggal 26-28 Mei 2002, di Mataram-NTB.
- Schalkwyk, Thomas & Woroniuk. 1999. Overview: Gender Equalities and the Agriculture Sector. In Langill, S. (author) *Indigenous Knowledge: A Resource Kit for Sustainable Development in Dryland Africa*. Reserch Officer-People, Land and Water-IDRC. Ottawa, Ontario.
- Sibuea, P. 2001. Keamanan Pangan dan Jaminan Mutu. Kompas, Harian Nasional, edisi 24/10/2001. Jakarta.
- Sibuea, P. 2002. Industri Pangan Nasional Sudah Siap Hadapi Globalisasi? Kompas, Harian Nasional, edisi 7/5/2002. Jakarta.
- Sibuea, P. 2005. TKI dan Pengembangan Agroindustri. Kompas, Harian Nasional, edisi 18/3/2005. Jakarta.
- ✓ Siwalima. 2005. MDG's Fasilitator Pemberantasan Kemiskinan Maluku. Harian Lokal, edisi 29/4/2005. Ambon.
- ✓ Sudiarto. 2004. Praktek Pertanian Yang Baik Untuk Antisipasi Pasar Global. Kompas, Harian Nasional, edisi 6/9/2004. Jakarta.
- Suryadi, E. T. 2002. Otonomi Daerah dan Perempuan Papua. Kompas, Harian Nasional, edisi 28/1/2002. Jakarta.
- Suryana, A. 2002. World Food Summit: Aliansi Internasional Mengikis Kelaparan. Kompas, Harian Nasional, edisi 18/6/2002. Jakarta.
- Tim LDP. 2005. Laporan Field Assessment di Kabupaten Maluku Tenggara & Desa Debut, Kerjasama UNPATTI & BAPPEDA Provinsi Maluku dengan dukungan UNDP Maluku Recovery Programme. Ambon.
- Tjahjadi, R. V. dan Grayatri. 1997. Gender dan Pertanian: Refleksi Ringkas Pengalaman PAN Indonesia. Dalam Handayani, S. dan Soetiyoso, Y. (eds.) *Merekonstruksi Realitas Pangan Perspektif Gender*. SBPY dan OXFARM UK/I. Yogyakarta.
- Thorburn, C. 2004. Musibah: Penguasaan Sumberdaya, Tindak Kekerasan, dan Penemuan Kembali Tradisi di Kepulauan Kei. Dalam Laksono, P.M., Topatimasang, R. (eds.) *Ken Sa Faak: Benih-benih Perdamaian dari Kepulauan Kei*. Nen Mas II-INSIST Press. Tual - Yogyakarta.
- Turang, P., Pr-Mgr. 2005. Menghargai Pangan Lokal: Sebuah Tinjauan Sosio-Pastoral. Dalam Saputra et al. (eds.) *Menghargai Pangan Lokal: Cukup-Sehat-Adil*. Sekretariat Komisi PSE/APP bekerjasama dengan LDD-KAJ, Komisi PSE-KWI, Jakarta.
- ✓ Vink, G. J. 1984. *Dasar-Dasar Usaha Tani Di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Wididana, G. N. and Higa, T. 2000/2001. Integrated Organic Agribusiness Using Technology Effective Microorganism (EM) in Bali Island. Diakses melalui <http://www.emro.co.jp>. Tanggal 25 September 2005.
- Wijaya, H. 1997. Gender dan Pengembangan Masyarakat: Pengalaman Lapangan Yayasan Pengembangan Pedesaan. Dalam Handayani, S. dan Soetiyoso, Y. (eds.) *Merekonstruksi Realitas Pangan Perspektif Gender*. SBPY dan OXFARM UK/I. Yogyakarta.
- Uli, J.A. 2005. Gender Sebagai Konstruksi Sosial Budaya. Makalah pada Lokakarya "Kesetaraan Perempuan dari Laki-Laki", kerjasama Sekretariat Jaringan Mitra Perempuan (JMP) dan Keuskupan Amboina, Tanggal 24 - 27 Agustus 2005, di Wisma Gonzalo Veloso-Karpan, Ambon.
- Ulie, C. 2005. Dialog Budaya Dalam Inovasi Teknologi Pertanian: Siasat Hemat Energi Bagi Pangan dan Agribisnis Kepulauan Masa Depan. Ambon Ekspres, Harian Lokal, edisi 13-14/10/2005. Ambon.
- Yun. 2004. Prospek Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil. Kompas, Harian Nasional, edisi 23/9/2004. Jakarta.
- Zulham, A. 2002. Meneropong Posisi Perempuan dalam Pembangunan Pesisir. Kompas, Harian Nasional, edisi 28/1/2002. Jakarta.